

SBY soal TKA:

Rakyat Harus Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri

S. Yugo Hindarto, CNN Indonesia | Senin, 23/04/2018 10:01 WIB



Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan pemerintah tentang bahaya serbuan Tenaga Kerja Asing ke Indonesia. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Jakarta, CNN Indonesia -- Penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing dipertanyakan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, karena serbuan tenaga kerja asing bisa berbahaya bagi negara.

Menurut SBY, saat ini jumlah pengangguran masih tinggi, dan seharusnya rakyat Indonesia harus menjadi tuan rumah di negaranya sendiri.

Serbuan pekerja asing itu, kata SBY menimbulkan keresahan di masyarakat. saat ini masyarakat kesulitan mendapat pekerjaan, sementara, lapangan kerja mulai banyak yang diisi TKA.

"Presiden dan Pemerintah Indonesia harus membela rakyatnya. Kita punya tenaga kerja, yang terampil juga banyak. Pemerintah harus berani. Dengan demikian kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri," kata SBY dalam keterangan tertulisnya, Minggu (22/4).

Lihat juga:

[SBY Minta Pemerintah Buka-bukaan soal Tenaga Kerja Asing](#)

SBY meminta pemerintah untuk menjelaskan secara gamblang soal kabar serbuan tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Penjelasan itu guna menjawab keresahan masyarakat, terutama mereka yang masih kesulitan mencari pekerjaan.

"Begini saja, karena ini pemerintahan rakyat, yang berdaulat rakyat, tolong pemerintah menjelaskan dengan gamblang, yang transparan, yang jujur. Sebetulnya berapa sih

tenaga kerja asing itu, berapa puluh ribu, atau belasan ribu atau ratusan ribu, kita tidak tahu," kata SBY.

Permintaan SBY itu menjawab kegundahan ratusan warga Kota Cilegon yang hadir dalam dialog ulama, umaro, dan tokoh masyarakat dengan SBY yang tengah menggelar lawatan Tour de Banten di Hotel The Royal Krakatau. Kabar terkait serbuan TKA, terutama dari Tiongkok, menjadi topik yang paling banyak ditanyakan warga dalam dialog tersebut.

Lihat juga:

['Sentilan' SBY dan Polemik Kasus Century](#)

Menurut SBY, terjadi pertukaran tenaga kerja ahli antara Indonesia dengan negara-negara tetangga memang sudah lazim, jika saling membutuhkan. Kerjasama tersebut diatur dalam Undang-Undang ASEAN.

"Yang tidak boleh, yang berbahaya, kalau datang tenaga kerja asing besar-besaran. Mengapa? Pengangguran masih banyak, tenaga kerja kita juga sudah banyak yang terampil dan bisa bekerja sendiri, mengapa kita harus mendatangkan tenaga kerja asing dalam jumlah yang besar," ungkapnya.

Hal itu, kata SBY, harus dijelaskan oleh pemerintah, agar tidak beredar hoaks atau berita palsu. Di sisi lain, SBY mengaku ia tidak dalam kapasitas untuk menjelaskan, karena takut nanti menjadi fitnah.

"Maka daripada jadi fitnah, tolong entah presiden, entah menteri, entah siapapun jelaskan kepada rakyat berapa besar tenaga kerja asing yang masuk Indonesia, dari negara mana mereka itu dan bekerja di bidang apa," katanya.

Lihat juga:

[SBY: Insya Allah Ada Pemimpin Baru 2019](#)

(ugo)